

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM umumnya mempunyai potensi besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM merupakan jenis usaha ekonomi yang produktif, didirikan seseorang atau organisasi yang bukan merupakan bagian langsung dari perusahaan besar atau cabang perusahaan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta memastikan pertumbuhan yang stabil dalam menghadapi persaingan bisnis. Para pelaku UMKM mendapat perhatian yang begitu besar sebagai tanda bahwa pemerintah juga berupaya dalam membantu mengelola perekonomian rakyat berpenghasilan rendah.

Pemerintah menyadari pentingnya UMKM di Indonesia karena mampu menciptakan peluang kerja yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat berpendapatan menengah kebawah. UMKM berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja, memaksimalkan penggunaan sumber daya daerah, meminimalisir pengangguran, mendorong kreativitas, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), serta memberikan sistem keamanan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah saat mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Menurut statistik yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2018, terdapat sebanyak 64.194.057 unit usaha UMKM. Data tersebut terdiri dari 63.350.222 unit Usaha Mikro, 783.132 unit Usaha Kecil, dan 60.702 unit Usaha Menengah. (Depkop, 2019).

Perekonomian Indonesia telah diuntungkan oleh banyaknya jumlah UMKM. UMKM berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dan menghasilkan devisa bagi

negara. UMKM berperan penting dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan. Peningkatan jumlah usaha dan pengusaha, beserta dampaknya terhadap pemasukan negara dan peluang kerja, mencerminkan peranan yang semakin signifikan dari sektor UMKM. Kuantitas usaha berkembang pesat dari sebelumnya, namun dari segi kualitas UMKM belum bisa mengimbangnya.

Begitu pula perkembangan UMKM yang semakin meningkat juga terlihat di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki 27 kecamatan dan 332 desa/kelurahan dengan total luas wilayah mencapai 2,093.47 km². Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep secara kontinu melaksanakan sejumlah inisiatif guna memperkuat sektor usaha mikro. Inisiatif yang telah dilakukan sejak tahun 2013 ini memberikan pelatihan kepada perusahaan untuk mendukung ekspansi UMKM. Pelatihan tersebut antara lain berupa tudung saji, pembuatan hantaran untuk lamaran, dan mengikuti latihan-latihan kerajinan tangan seperti membatik, menyulam pita, membuat manik-manik, membuat lilin, dan lain-lain. Wilayah ini kaya akan adanya berbagai UMKM yang terdistribusi diberbagai kecamatan maupun desa. Berbagai macam produk UMKM ada di Kabupaten ini, yakni meliputi ukiran kayu, batik, jamu, pusaka keris, serta makanan dan minuman khas Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pendampingan modal usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menampung serta membantu memperluas akses pemasaran produk atau hasil kerajinan dengan disediakannya Mall UMKM. Program lain yang dilakukan adalah dengan membeli produk UMKM dalam upaya memberikan rangsangan agar ekonomi mikro terus bergerak di Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten Sumenep, peningkatan peran dan

kemampuan UMKM memiliki signifikansi yang sangat penting karena memiliki potensi besar dalam memacu aktivitas ekonomi lokal serta menjadi sumber pendapatan utama yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan UMKM di Kabupaten Sumenep terus dilakukan. Selain memberikan berbagai pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, unit pengelola Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumenep berencana membentuk kampung UMKM guna meningkatkan perkembangan UMKM. Dengan dibentuknya kampung - kampung UMKM tentunya perlu adanya fasilitas yang memadai. Dengan fasilitas yang ada para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep mampu meningkatkan aspek-aspek seperti peningkatan kemasan, harga, dan penjualan sehingga para pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara global agar dapat diketahui oleh masyarakat luar Madura bahkan Asia. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik sangatlah penting dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Pengelolaan keuangan menjadi faktor krusial dalam menjalankan bisnis dan mencapai tujuan kesejahteraan. Keberhasilan atau kegagalan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik. Untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang dikendalikan oleh pelaku UMKM, pengelolaan keuangan membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan yang mendalam terkait aspek keuangan, keahlian, dan keterampilan dalam membuat laporan. Akuntansi adalah alat yang biasa digunakan dalam pengelolaan keuangan. Akuntansi merupakan suatu proses terstruktur untuk memberikan data keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pola perilaku dalam pengelolaan keuangan harus mencerminkan cara seseorang mengelola dan memanfaatkan

aset keuangan. Perilaku pengelolaan keuangan merupakan kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya mereka dengan cara yang dianggap produktif (Putri, 2020).

Perilaku pengelolaan keuangan merupakan pendekatan yang digunakan seseorang dalam mengalokasikan dan mengalangkan dana. Jika pengelolaan keuangan tidak optimal, hal ini dapat mengakibatkan kondisi kebangkrutan. Pada dasarnya, untuk memenuhi keinginan berdasarkan penghasilan yang diperoleh maka diperlukannya perilaku pengelolaan keuangan (Sari et al., 2020).

Seseorang dengan pemahaman tentang perilaku pengelolaan keuangan umumnya paham pembuatan perencanaan dana, pengendalian pengeluaran, melakukan penghematan, dan bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan pribadinya. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pemahaman keuangan yang kuat untuk membatasi perilaku pengelolaan keuangan yang tidak sesuai atau tidak tepat dan mencegah potensi permasalahan dalam hal keuangan. Pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sumenep masih banyak yang belum memahami pengelolaan keuangan usahanya sendiri, sehingga seringkali diadakan sosialisasi mengenai cara pengelolaan keuangan usaha yang baik yakni dengan memetakan keuangan agar tidak tercampur dengan uang pribadi sehingga laporan keuangan yang disusun tidak berantakan. Kegagalan pengelolaan keuangan dalam mengembangkan usaha, karena adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki UMKM, seperti modal yang tidak mencukupi, pengelolaan yang kurang efektif, minimnya kegunaan informasi dan teknologi, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, serta terbatasnya pengetahuan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan usaha. Oleh karena itu, perlu beberapa tindakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

bagi para pelaku UMKM, salah satunya dari aspek pengelolaan keuangan yang efektif.

Literasi keuangan adalah pemahaman dan keterampilan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang terkait keuangan serta membantu seseorang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan agar mencapai kesejahteraan. Sebagian besar UMKM tidak mempertimbangkan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Literasi keuangan melibatkan parameter seperti sikap keuangan, perilaku, dan pengetahuan. Tujuan dari literasi keuangan adalah memberikan pendidikan kepada pelaku UMKM agar mereka memperoleh pengetahuan yang memadai. Proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan memungkinkan seseorang menangani keuangannya dengan lebih baik sering juga disebut sebagai literasi keuangan (Indriyati, 2020).

Literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Artinya, seseorang akan mampu mengelola keuangan bisnisnya dengan lebih efektif jika memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi keuangan. Selain itu, peningkatan pendapatan tidak akan digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan akan diarahkan untuk investasi yang produktif. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi dalam meningkatkan roda perekonomian secara keseluruhan (Pinem & Mardiatmi, 2021).

Dengan adanya pemahaman literasi keuangan, mereka dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan seperti simpanan bank, kredit, investasi, serta mengelola keuangan mereka dengan baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya keuangan usaha, perencanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan. Dengan literasi keuangan, masyarakat atau

pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sumenep lebih mengetahui produk-produk keuangan dan meminimalisir adanya penipuan. Terdapat kegiatan sosialisasi literasi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar mereka memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan memperluas wawasan dalam memilih instrumen keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Sumenep.

Inklusi keuangan adalah suatu usaha untuk memastikan ketersediaan akses yang mudah dan memadai dalam mengenali berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Inklusi keuangan adalah pergeseran cara berpikir pelaku ekonomi tentang uang dan keuntungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pengukuran inklusi keuangan melibatkan penggunaan parameter untuk mengevaluasi keunggulan, aksesibilitas, dan penggunaan layanan keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kemampuan untuk dengan mudah, cepat, aman, dan dengan biaya terjangkau mengakses layanan keuangan formal yang berkualitas, sesuai kapabilitas mereka (Yanti, 2019).

Inklusi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Penting untuk mempertimbangkan efektivitas implementasi inklusi keuangan karena perannya yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika inklusi keuangan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, hal tersebut akan semakin

mempermudah mereka dalam memperoleh akses secara komprehensif terhadap produk dan layanan keuangan (Pinem & Mardiatmi, 2021).

Inklusi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep tergolong rendah, karena itu, beberapa UMKM tidak mencapai perkembangan sesuai harapan. Beberapa UMKM hanya menjalankan usaha mereka tanpa adanya strategi pengembangan yang jelas. Akibatnya, belum ada ekspansi yang signifikan pada modal yang dimiliki. Di Kabupaten Sumenep, masih terdapat banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki kepercayaan diri dalam menentukan tujuan penggunaan dana yang mereka miliki untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan akan tercapai ketika setiap individu dapat dengan mudah mendapat pelayanan keuangan, terutama pelaku UMKM yang menjadi fokus dari inklusi keuangan.

Pengetahuan laporan keuangan menjadi elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan finansial. Pengetahuan mengenai laporan keuangan memerlukan perkembangan kemampuan keuangan dan penguasaan terhadap instrumen-instrumen keuangan. Pengetahuan di bidang keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan tanggung jawab keuangan individu, "Seseorang yang memiliki perilaku keuangan yang bertanggung jawab cenderung efektif dalam menggunakan uang yang dimilikinya, seperti membuat anggaran, menyimpan uang, uang dan mengontrol pengeluaran, berinvestasi, dan membayar kewajiban tepat waktu" (Maysarah, 2022).

Pengetahuan laporan keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pelaku UMKM. Dalam konteks ini, tingginya pengetahuan keuangan seseorang, semakin optimal perilaku pengelolaan keuangannya. Pengetahuan keuangan mencakup pemahaman individu terhadap berbagai aspek keuangan,

termasuk instrumen dan keterampilan keuangan. Penyusunan anggaran diidentifikasi sebagai tantangan utama bagi pelaku UMKM dalam memahami pengetahuan laporan keuangan. Mayoritas pemilik UMKM tidak pernah membuat anggaran keuangan untuk mengelola usahanya (Humaira, 2017).

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap perilaku pengelolaan keuangan, hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan tentang laporan keuangan, sikap *Love of Money*, dan literasi keuangan memiliki pengaruh secara signifikan dengan memengaruhi cara orang mengelola keuangan. Mayoritas UMKM mikro menyadari pentingnya praktik pengelolaan keuangan dalam menilai kondisi bisnis mereka (Fathurrahman et al., 2020). Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan menjadi peran penting dalam pertumbuhan bisnis, karena bisnis yang sukses membutuhkan manajemen keuangan yang baik pula (Pinem & Mardiatmi, 2021).

Dalam membuka usaha, pelaku UMKM rata-rata tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan untuk pengelolaan usaha yang dibukanya. Hal tersebut diperkuat dari salah satu penelitian yang menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak menyusun pembukuan terkait manajemen usaha mereka. Selain itu, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perencanaan anggaran cenderung rendah dan dapat dengan mudah ditingkatkan (Wirjono & Raharjono, 2012). Dengan demikian, para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep diperintahkan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Informasi keuangan disajikan untuk pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Pencatatan laporan keuangan harus mematuhi SAK yang berlaku di Indonesia. Untuk menyederhanakan pelaporan keuangan UMKM, khususnya di Kabupaten Sumenep, diterbitkan SAK EMKM untuk

mengakomodasi tingkat pemahaman yang masih terbatas pada pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Di banyak daerah tidak terkecuali Kabupaten Sumenep, sering terdapat utang yang konsumtif atau penipuan berkedok investasi. Fakta tersebut menggambarkan kurangnya penguasaan terkait literasi dan inklusi keuangan, yang mampu meningkatkan kesadaran terhadap risiko penawaran investasi ilegal yang sering terjadi di masyarakat. Literasi, inklusi keuangan, dan pengetahuan laporan keuangan juga sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep yakni kurangnya pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan secara tertulis dan formal sehingga para pelaku UMKM hanya membuat catatan terkait dengan pengeluaran dan pemasukan dalam bentuk yang sederhana. *Financial freedom* adalah keadaan di mana seseorang memiliki tabungan yang mencukupi, tidak memiliki hutang, memiliki investasi, dan memiliki jumlah uang yang mencukupi untuk mendukung gaya hidup yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Untuk mencapai *financial freedom* dalam membangun perekonomian Kabupaten Sumenep, pemerintah dan sektor swasta perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi keuangan. Namun yang menjadi permasalahannya yakni pendanaan untuk meningkatkan usaha mikro terbatas, sehingga tidak realistis jika semua UMKM di Kabupaten Sumenep mengandalkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah sebagai satu-satunya sumber dana.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi, Inklusi, dan Pengetahuan Laporan

Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang disebutkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah pengetahuan laporan keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan laporan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat:

- a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dalam hal mengkritisi pengaruh literasi, inklusi, dan pengetahuan laporan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, dapat menjadi sumber wawasan serta pengetahuan terkait perilaku dalam pengelolaan keuangan UMKM.
2. Mampu menjadi panduan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dalam kegiatan bisnis guna mencapai kesejahteraan keuangan.
3. Hasil penelitian ini juga diantisipasi untuk berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana literasi, inklusi, dan pengetahuan laporan keuangan mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan.